

**APLIKASI *CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING* (CTL) SENSITIF GENDER BAGI
PENINGKATAN KUALITAS MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH RIADHUL
ULUM SINTUNG KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM**

Laporan Kegiatan

Oleh:

Nurhilaliati, M.Ag
197302082000032001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PUSAT PENGABDIAN MASYARAKAT
MATARAM
2009**

A. Analisis Situasi

Salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Realisasi pencerdasan kehidupan bangsa tertuang dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa '*setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*'. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin realisasi pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi manajemen pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Dalam rangka mendukung terealisasinya pendidikan yang relevan, yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia, maka konsep pendidikan yang kontekstual (*contextual learning*) menjadi penting untuk dilaksanakan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengisyaratkan bahwa dalam pendidikan, peserta didik (laki-perempuan) dituntut secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya.² Selain itu, dalam undang-undang tersebut di atas juga diisyaratkan bahwa peserta didik (laki-perempuan) wajib mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.³ Untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan hak untuk meningkatkan potensi dirinya, pada Pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Sementara itu, ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dengan

¹ Lihat UUD 1945 alinea ke-4.

² Lihat Bab I Pasal 1 dan Bab II pasal 3.

³ Lihat Bab IV pasal 5.

memperhatikan di antaranya peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, tuntutan dunia kerja serta dinamika perkembangan global.

Hadirnya undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah respon terhadap adanya undang-undang Otonomi Daerah, yang mengisyaratkan bahwa pembangunan di daerah harus dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dengan logika itu pula, maka sistem pendidikan *pun* harus disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan/pembangunan lokal-regional daerah. Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, dalam acara dialog pendidikan di Metro TV mengatakan bahwa kebutuhan pendidikan Gorontalo dengan Jakarta mungkin sama, tapi *stressing point* pendidikan dua daerah ini sangat jauh berbeda, karena adanya perbedaan realitas sumber daya dan latar sosial yang berbeda.

Realisasi pembenahan sistem pendidikan ini sedang dan terus dilakukan. Berbagai seminar, pelatihan, workshop seakan tiada henti digelar untuk mencapai cita ideal bagi terealisasinya UU. No. 20 tahun 2003. Termasuk di NTB, pembenahan selalu dan terus dilakukan. Tidak hanya di lembaga pendidikan umum, namun juga lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang ‘bernaung’ di bawah Departemen Agama terus berbenah diri untuk menjamin peserta didiknya mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU. No. 20 tahun 2003.

Sebagian lembaga pendidikan yang didukung fasilitas dan sumber daya manusia (tenaga pengajar) yang baik melakukan pembenahan dengan cepat. Namun lembaga pendidikan yang hanya dengan modal ‘pas-pasan’ berjalan terseok untuk mencapai idealisme pendidikan. Tanpa harus menyepelkan lembaga pendidikan Islam, madrasah belum siap secara utuh untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Paradigma lama, manajemen

tradisional, sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat sekitar sekolah, fasilitas pendukung, media pembelajaran adalah sederatan alasan yang melatari mengapa madrasah/lembaga pendidikan Islam harus tertinggal di barisan belakang. Di samping itu, pengembangan madrasah di NTB masih berorientasi kuantitas, bukan/belum kualitas.⁴ Termasuk di sini adalah Madrasah Tsanawiyah Riadhul Ulum Sintung Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Madrasah ini, dalam pengamatan kami selama beberapa bulan, menyimpan masalah yang menghambat ketercapaian mutu pendidikan, baik internal maupun eksternal.

Beberapa hasil identifikasi sementara ini, masalah *internal* yang dihadapi oleh Madrasah Riadhul Ulum adalah rendahnya kualitas kompetensi guru sehingga banyak guru yang terpaksa mengasuh mata ajar yang bukan bidangnya, prestasi dan *life skill* siswa yang masih rendah, implementasi kurikulum belum optimal, manajemen pengelolaan madrasah, kemampuan managerial kepala sekolah, dan intervensi yayasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan masalah *eksternal* yang dihadapi madrasah ini adalah terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat (orang tua, Dinas/instansi terkait, Lembaga Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah yang bermutu.

Realitas di atas mendorong penulis untuk ‘berembuk’ bersama elemen terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Riadhul Ulum Sintung Ampenan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan CTL yang sensitif gender.

⁴ Ahmad Gazali dkk, “Mengelola Madrasah Mandiri Berkualitas”, dalam *Transformasi*, Vol. I No. 2 Juli-Desember 2005, 66.

B. Kajian Teori

1. Madrasah: Lembaga Pendidikan Islam

Eksistensi madrasah pada era 1970-an, memang dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Madrasah hanya dipandang sebagai pendidikan pelengkap (*secondary*), dan tidak tercover dalam sistem pendidikan nasional. Setelah ditetapkannya UU. No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) posisi sejajar dengan sekolah umum. Ini kemudian diperkuat dengan hadirnya UU. No. 20 tahun 2003 yang secara tegas menyatakan bahwa madrasah adalah sekolah umum sebagaimana sekolah lainnya.⁵ Pengakuan secara legal-formal terhadap lembaga madrasah ini, mendorong masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka ke lembaga pendidikan Islam ini.

Kebijakan pemerintah terhadap madrasah ini, pada satu sisi adalah anugerah. Pada sisi lain, lembaga madrasah harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari lembaga pendidikan umum. Dilema yang dihadapi lembaga madrasah ini adalah dalam pola pendidikan; apakah harus bertahan dengan *stressng* pada pendidikan agama, atau pengetahuan umum bagi lulusannya. Penggabungan penguasaan materi (umum dan agama) dipertanyakan oleh sebagian orang, mampukah madrasah bersaing seimbang dengan lembaga pendidikan umum yang hanya fokus pada pengetahuan umum.⁶ Hal ini sangat tergantung pada kemampuan pengelola madrasah serta pihak yang berwenang untuk membawa keluar dari persoalan klasik yang dihadapi selama ini.

Yang pasti bahwa madrasah adalah milik masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan kuantitas/jumlah madrasah yang tumbuh pesat. Madrasah Ibtidaiyyah di Indonesia sebanyak 24.650 buah (1025 MIN, 23.625 MIS), Madrasah Tsanawiyah

⁵ Lihat UU. No. 20 tahun 2003 BAB VI pasal 17 dan 18.

⁶ Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, (Malang, UMM Press; 2006), 112.

sebanyak 8.600 buah (853 MTsN, 7.547 MTs. Swasta), Madrasah Aliyah sebanyak 2.758 buah (57 MAN, 2.701 MA Swasta).⁷ Jumlah ini semakin meyakinkan bahwa madrasah adalah milik masyarakat; ide pendirian dan pelaksanaannya *pun* berdasarkan pada kebutuhan pendidikan masyarakat.⁸ Di NTB saja, terdapat 2000 lebih madrasah dari tingkat ibtidiyyah hingga aliyah.⁹

2. Contextual Teaching and Learning (CTL)

Contextual Teaching and Learning atau pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang mengarahkan guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan realitas siswa/siswa, dan menstimulasi siswa/siswi untuk menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam realitas kehidupan. Istilah ini juga kerap kali disejajarkan dengan istilah PAKEM, yaitu Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.

Contextual and Teaching Learning/CTL (pembelajaran kontekstual) memiliki tujuh komponen utama, sebagaimana berikut:

| Komponen | Uraian |
|---|---|
| 1. Konstruktivisme (<i>Constructivisme</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Guru memfasilitasi siswa/siswi untuk membangun sendiri pengetahuan/konsep-konsep yang sedang dipelajari melalui tahapan sedikit demi sedikit. • Struktur pengetahuan dikembangkan siswa/siswi melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi maksudnya struktur pengetahuan baru dibangun atas dasar pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi maksudnya struktur pengetahuan yang sudah ada dimodifikasi untuk menampung dan menyesuaikan dengan hadirnya pengalaman baru • Mampu mempraktikkan pengetahuan/pengalaman yang telah diperoleh dalam konteks kehidupan. |

⁷ Data ini adalah data tahun 1998 yang dikutip dari A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung, Mizan; 1998). Angka tersebut kemungkinan terus bertambah.

⁸ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Logos; 2001), 131.

⁹ Lihat *Transformasi*, Vol. 3 No. 2 Edisi Juli-Desember 2007, 73-75.

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. |
| 2. Bertanya (<i>Questioning</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Guru menggunakan strategi bertanya dan mengaktifkan siswa/siswi untuk bertanya. Kegiatan bertanya merupakan basis inkuiri, yakni menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. <p>Fungsi Bertanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa/siswi untuk menggali informasi, baik informasi administrasi maupun akademis, untuk mengecek pemahaman siswa/siswi, untuk membangkitkan tanggapan siswa/siswi, untuk mengetahui sejauhmana keinginan siswa/siswi, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diketahui siswa/siswi, untuk memfokuskan perhatian siswa/siswi pada sesuatu yang dikehendaki guru, untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan siswa/siswi, dan untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa/siswi. |
| 3. Inkuiri (<i>Inquiry</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Guru harus selalu merancang kegiatan yang membuat siswa/siswi dapat menemukan. Inkuiri memiliki siklus sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> – Observasi – Bertanya – Mengajukan hipotesis atau dugaan – Pengumpulan data – Kesimpulan |
| 4. Masyarakat Belajar (<i>Learning Community</i>) | <ul style="list-style-type: none"> Menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Anggota komunitas/masyarakat belajar tidak hanya terbatas pada orang-orang yang berada di dalam kelas saja, tetapi juga orang-orang di sekitar sekolah atau di luar sekolah. Guru disarankan selalu menggunakan pembelajaran kelompok yang anggotanya terlibat aktif dalam bertukar gagasan dan pemecahan masalah bersama (Belajar kooperatif) |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Guru dapat melakukan kolaborasi dengan mendatangkan seorang “ahli” ke kelas. |
| 5. Pemodelan (<i>Modelling</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Diupayakan terdapat contoh, model, peragaan atau demonstrasi yang dapat memudahkan siswa/siswi memahami/melakukan konsep. |
| 6. Penilaian Otentik (Authentic Assessment) | <ul style="list-style-type: none"> • Guru melakukan pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa/siswi. • Dilakukan secara terintegrasi dalam pembelajaran/ selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. • Data merupakan kegiatan nyata yang dikerjakan siswa/siswi pada saat melakukan pembelajaran atau <i>otentik</i>. • Kemajuan belajar dinilai dari proses dan hasil. • Penilaian <i>otentik</i> menilai pengetahuan dan keterampilan (performansi sikap). • Penilai tidak hanya guru, bisa antar siswa/siswi, atau siswa/siswi sendiri. • Bisa digunakan untuk penilaian formatif maupun sumatif (Tes [tulis obyektif] tidak termasuk penilaian otentik). Nama penilaian otentik sebenarnya mengacu pada penilaian kinerja (performance) yang tidak mungkin dilakukan dengan cara tes. Penilaian otentik lebih ke <i>application of knowledge</i>, sedangkan tes lebih ke <i>knowledge</i> saja/kognitif. • Berkesinambungan • Hasil penilaian dapat digunakan sebagai <i>feed back</i> atau umpan balik • Bentuk: proyek/kegiatan/tugas, PR siswa/siswi, kuis, karya Siswa/siswi, presentasi/penampilan siswa/siswi/unjuk kerja, demonstrasi, laporan, jurnal, tes, karya tulis. |
| 7. Refleksi (Reflection) | <ul style="list-style-type: none"> • Berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir tentang apa yang sudah dilakukan pada masa lalu. • Refleksi juga merupakan respon terhadap kejadian, kegiatan, atau pengetahuan yang baru diterima. • Refleksi ini bagi siswa/siswi juga dapat direalisasikan dalam bentuk catatan atau jurnal di buku siswa/siswi, diskusi, atau hasil karya. • Refleksi ini bermakna bagaimana siswa/siswi dapat merasakan apa makna dari perbuatan belajarnya dan |

| | |
|--|--|
| | apa yang dapat diperoleh dari pembelajaran yang dialami. |
|--|--|

3. Pembelajaran Kontekstual Sensitif Gender

Undang-Undang Republik Indonesia menjamin setiap warganegara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Berdasarkan UU RI tersebut siswa dan siswi mendapatkan akses yang sama baik pada kurikulum, ujian, pengajar, sarana maupun prasarana sekolah. Pembelajaran yang menjamin bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak yang sama di lapangan pendidikan (inklusif gender) memiliki dasar hukum yang kuat karena telah diatur dalam UURI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Pada bagian III Pasal 10 terutama butir (b) dan (c), dinyatakan bahwa:

”Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:

- (a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;
- (b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
- (c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;...”

Undang-undang tersebut memberikan amanat mengenai adanya persamaan hak siswa/siswi laki-laki dan perempuan, serta penghapusan setiap konsep yang stereotip (memberikan label negatif) mengenai peranan laki-laki dan perempuan baik melalui buku wajib, program-program sekolah maupun metode mengajar. Amanat UURI penting untuk direalisasikan agar laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pendidikan.

Pembelajaran inklusif gender ialah pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Kesamaan kesempatan/akses bagi laki-laki (siswa) dan perempuan (siswi).
2. Kesamaan peranserta/partisipasi laki-laki (siswa) dan perempuan (siswi).
3. Kesamaan kontrol/tanggung jawab laki-laki (siswa) dan perempuan (siswi).

Adapun pembelajaran kontekstual sensitif gender mempunyai karakteristik sebagai berikut :

| No | Karakteristik | Indikator |
|----|---|---|
| 1 | Berpusat pada peserta didik | Siswa laki-laki dan perempuan secara setara aktif dalam mengemukakan gagasan, bertanya, dan mengkritisi gagasan yang lain tanpa perasaan minder (<i>inferior</i>) atau lebih hebat (<i>superior</i>). |
| 2 | Mengembangkan kreativitas | Siswa laki-laki dan perempuan mampu menciptakan dan mengembangkan gagasan tanpa dibatasi oleh peran-peran baku (<i>stereotype</i>), misalnya: <i>partisipasi dalam pelajaran tidak didominasi anak laki-laki. Anak laki-laki dan perempuan diharapkan mampu berpikir mengkaitkan dengan apa yang dialami.</i> |
| 3 | Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang | Siswa laki-laki dan perempuan dapat menciptakan rasa saling menghormati, menghargai teman yang berbeda jenis kelaminnya. Keduanya aktif mengkritisi gagasan yang berbeda karena perbedaan pengalaman sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. |
| 4 | Kontekstual | <ul style="list-style-type: none"> • Siswa laki-laki dan perempuan memiliki peluang untuk dapat menghubungkan materi pelajaran dengan konteks kehidupannya. Keduanya mampu membedakan perbedaan kondisi sebagai anak laki- |

| | | |
|----|--|---|
| | | laki dan anak perempuan akibat konstruksi sosial. <ul style="list-style-type: none"> • Guru memfasilitasi siswa laki-laki dan perempuan tanpa diskriminatif untuk membangun sendiri konsep-konsep yang sedang dipelajari. |
| 5 | Menyediakan pengalaman belajar yang beragam | <ul style="list-style-type: none"> • Guru mampu memfasilitasi cara belajar siswa laki-laki dan perempuan secara beragam, karena keduanya mempunyai pengalaman perlakuan yang berbeda akibat konstruksi sosial. |
| 6 | Belajar melalui berbuat | <ul style="list-style-type: none"> • Siswa laki-laki maupun perempuan mampu mencoba dan melakukan sendiri apa yang sedang dipelajari. • Guru memberikan kesempatan dan peran yang sama kepada keduanya. Jika partisipasi keduanya tidak seimbang maka guru mampu mendorong siswa laki-laki atau perempuan yang kurang aktif dan tertinggal. |
| 7 | Inti pembelajaran adalah menemukan (inkuiri) bukan mengingat | <ul style="list-style-type: none"> • Siswa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama, dan aktif mengajukan pertanyaan, membuat dugaan, mengumpulkan data-data dan menganalisisnya, serta membuat kesimpulan. |
| 8 | Kerja kelompok (kooperatif) dan kompetitif | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kelompok-kelompok yang anggotanya terlibat secara aktif dalam bertukar gagasan dan pemecahan masalah bersama dengan jumlah laki-laki dan perempuan secara seimbang. • Keduanya mampu bekerjasama tanpa ada subordinasi dan marginalisasi jenis kelamin tertentu. • Guru mampu mendorong siswa laki-laki dan perempuan berlomba untuk maju, dan terampil memadukan strategi pembelajaran kompetitif dan kooperatif. |
| 9 | Pemodelan (contoh yang baik) | <ul style="list-style-type: none"> • Diupayakan ada contoh, model, peragaan atau demonstrasi yang dapat memudahkan siswa laki-laki dan perempuan memahami konsep. • Pemodelan menghindari pelabelan (<i>stereotype</i>), dan secara substansi tidak bias gender. |
| 10 | Refleksi (menilai kemampuan diri) | <ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir pelajaran guru memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan untuk memberikan masukan terhadap proses maupun hasil pembelajaran yang telah dilakukan. |
| 11 | Evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Guru melakukan penilaian dengan instrumen dan kriteria yang sama kepada siswa laki-laki maupun perempuan. |

4. Pemberdayaan Madrasah

Pemberdayaan adalah memberikan daya (kekuatan/*power*) dari yang kuat (*powerfull*) kepada kelompok yang lemah (*powerless*). Dalam hal ini, lembaga pendidikan tinggi sebagai kelompok kuat dalam bidang pendidikan kepada kelompok lemah (madrasah).

Pemberdayaan dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kecendrungan pertama ini dapat dinamakan sebagai kecendrungan primer dari proses pemberdayaan. Sedangkan kecendrungan *kedua*, atau kecendrungan skunder, yaitu proses pemberdayaan yang lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Model kedua ini dikembangkan oleh Paulo Freire, dengan konsepnya tentang *conscientization*; yaitu suatu proses stimulasi kekuatan dengan membangun kesadaran kritis suatu masyarakat terhadap realitas sosial yang mereka hadapi.¹⁰

Pemberdayaan dilakukan karena adanya proses marginalisasi terhadap kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah kelompok madrasah terbelakang korban sebuah kebijakan politik dan kebijakan yang 'menganaktirikan' sistem pendidikan madrasah. Proses pemberdayaan adalah proses menggugah kesadaran setiap individu untuk memperbaiki diri dari satu posisi menuju

¹⁰ Paulo Freire, *Pedagogy of the Opressed*, (New York, Seabury Press, 1070), hal. 13.

posisi yang lebih baik. Oleh sebab itu, pemberdayaan menuntut adanya penyadaran yang bersifat *take and give* (timbang-balik). Termasuk dalam pemberdayaan madrasah, yang diharapkan adalah adanya kesadaran yang sama ke arah perubahan system pendidikan Islam yang lebih baik.

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari paparan analisis situasi di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan ini :

1. Bagaimanakah pengetahuan guru madrasah Riyadhul Ulum tentang PAKEM/CTL dalam pembelajaran?
2. Bagaimakah keberhasilan guru dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan selama ini?
3. Bagaimanakah hubungan guru dan siswa di madrasah Riyadul Ulum?
4. Bagaimakah hubungan guru dan pengelola madrasah?
5. Bagaimanakah manajemen/pengelolaan madrasah?
6. Apakah guru telah memberikan/memancing ide kreatif siswa dalam kegiatan belajar-mengajar?
7. Apakah guru selalu memberikan tugas individual dalam bentuk *inquiry* kepada siswa agar mandiri dalam pencapaian pengetahuan?
8. Apakah guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk memperdalam konsep dan pengetahuan?
9. Bagaimanakah menyusun RPP yang menumbuhkan kreatifitas siswa efektif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran?

10. Bagaimanakah aplikasi RPP tersebut dalam proses pembelajaran dan apa yang harus disiapkan oleh guru?

Dari identifikasi masalah yang ada, ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus pencarian/solusi dalam kegiatan binaan ini, yaitu :

- 1 Bagaimanakah menyusun RPP yang menumbuhkan kreatifitas siswa efektif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran?
- 2 Bagaimanakah aplikasi RPP tersebut dalam proses pembelajaran dan apa yang harus disiapkan oleh guru?

D. Tujuan Kegiatan

Dari uraian rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan kegiatan binaan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Menyusun RPP yang dapat menumbuhkan kreatifitas siswa dalam lingkup pendidikan madrasah Riyadhul Ulum Sintung Ampenan dengan pendekatan PAKEM.
- 2 Mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan menyediakan media, metode dan strategi yang digunakan dalam PAKEM.

E. Manfaat Kegiatan

Secara teoritis-akademis, manfaat kegiatan binaan ini diharapkan dapat memberikan pola/model pemberdayaan madrasah, khususnya yang terkait dengan PAKEM/CTL. Secara praktis-empiris, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan perubahan terhadap pengembangan mutu pendidikan di Madrasah Riyadhul Ulum.

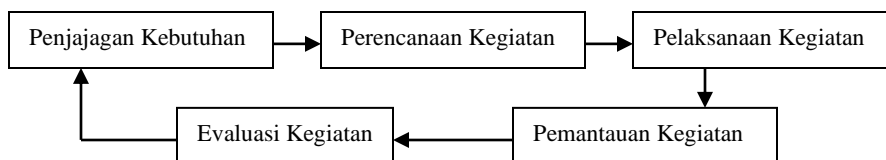
Secara lebih khusus *ending* kegiatan binaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas Departemen Agama, LSM, dan masyarakat sebagai salah satu pola dalam pengembangan mutu dan kualitas madrasah.

F. Metode Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku pendidikan di lingkungan Madrasah Riyadatul Ulum Sintung. Kegiatan ini akan didesain dengan menggunakan metode *participatory action research* (PAR). Dengan metode ini, kegiatan binaan ini akan dimulai dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para pelaku pendidikan di madrasah. Untuk itu, tim dosen (fasilitator) mengawali kegiatan ini dengan dialog tentang apa yang diketahui oleh para guru, apa yang dilakukan dan yang dialami oleh guru dalam proses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di madrasah mereka.

Kegiatan binaan ini diawali dengan penjajagan kebutuhan (diagnosis awal), perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan kegiatan, dan evaluasi kegiatan.

Alur program binaan tersebut tampak dalam gambar berikut:



Untuk mencapai kebutuhan tersebut di atas, maka tehnik yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. **Brainstorming:** dengan tehnik ini, tim fasilitator akan menggali pengetahuan dan pengalaman guru madrasah dalam proses pembelajaran dan mencoba untuk masuk dengan pendekatan CTL yang sensitif gender. Dengan metode ini diharapkan memberikan penyadaran terhadap guru untuk mencapai mutu dan kualitas pendidikan madrasah yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin.
2. **Focused Group Discussion (FGD)** : setelah menggali pengetahuan dan pengalaman para guru, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan diskusi terfokus tentang proses pembelajaran yang dilakukan selama ini. Hal ini akan dilakukan dengan semua guru yang

ada di madrasah. Materi diskusi adalah terkait dengan materi pembelajaran, metode belajar, strategi pembelajaran, dan lain-lain yang terkait dengan proses pembelajaran. Dengan adanya diskusi ini diharapkan akan ditemukan pola aksi yang akan dilaksanakan secara bersama dalam perbaikan mutu dan kualitas madrasah. Dalam FGD ini tim fasilitator hanya berfungsi sebagai pengarah, tidak menggurui. Dan untuk mencapai hasil yang diinginkan, kegiatan ini akan dilengkapi dengan *workshop*, *pelatihan*, dan *pendampingan*, dengan melibatkan para ahli dan praktisi dalam bidang pendidikan.

3. **Wawancara Semi Terstruktur:** adalah alat penggalan informasi berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu. Wawancara ini bersifat terbuka dan santai, namun dibatasi oleh topik/masalah yang telah dipersiapkan. Walau demikian, topik/masalah yang ada dalam wawancara semi terstruktur dapat dikembangkan sebatas relevan dengan bahasan yang ditentukan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui kondisi spesifik yang ada dalam madrasah, mengkaji berbagai aspek pembelajaran yang ada di madrasah, menbandingkan metode, kemampuan guru yang ada di madrasah, melihat pandangan individu/kelompok guru dengan proses pembelajaran di madrasah. Dengan wawancara ini fasilitator dapat mendapatkan gambaran utuh tentang realitas madrasah. Sumber informasi dalam wawancara ini adalah perorangan dan kelompok. Adapun langkah yang akan ditempuh dalam wawancara adalah sebagai berikut: *pertama*, melakukan persiapan dengan mengkaji ulang informasi yang sudah didapat, dan menyusun daftar topik pertanyaan yang akan menjadi fokus wawancara. *Kedua*, melakukan perkenalan dengan individu dan kelompok yang ada dalam madrasah (*bina swasana*). *Ketiga*, melakukan wawancara yang dimulai dengan pertanyaan sederhana yang sudah biasa diketahui oleh guru, dan bersifat netral.

G. Kerangka Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan pembinaan ini dilakukan setelah pelaksanaan *monitorng* yang direncanakan secara periodik 3 bulanan. Evaluasi dilakukan bersama dengan guru di madrasah. Materi evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan mengikuti siklus sebagaimana skema berikut¹¹ :

Identifikasi → Perencanaan → Pelaksanaan → Evaluasi→ Identifikasi

Tahap awal evaluasi adalah dengan melakukan identifikasi program yang belum dapat dijalankan. Peluang, kelemahan dan kekuatan yang ada dalam program yang direncanakan. Setelah identifikasi, menyusun kembali program agar dapat diaplikasikan sesuai dengan priode yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pelaksanaan program yang telah dievaluasi.

Proses evaluasi ini juga akan melibatkan *stake holder* dari pihak luar terkait, yaitu para ahli dan praktisi pendidikan yang secara obyektif dapat memberikan evaluasi konfrehensif tentang masalah di lapangan.

¹¹ LPM IAIN Mataram, *Panduan Kuliah Kerja Partisipatif*, (Mataram, IAIN Mataram; 2007).

H. Anggaran Kegiatan

Kegiatan ini didanai oleh dana DIPA IAIN Mataram dengan total nilai Rp. 10.000.000,-

. Rincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

| Kegiatan | Pelaksanaan | Anggaran | Total |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Observasi Awal | Transportasi | @Rp. 100.000, x 3 org | Rp. 600.000, |
| | Lumpsum | @Rp. 100.000, X 3 org | |
| Pelaksanaan Binaan | Transportasi | @Rp. 100.000, X 3 org X 3 kali | Rp. 900.000, |
| | Lumpsum | @Rp. 100.000, x 3 org x 3 kali | Rp. 900.000, |
| | FGD | @Rp. 25.000, x 17 orang x 2 | Rp. 850.000, |
| | Konsumsi FGD | @Rp. 10.000, x 25 paket | Rp. 250.000, |
| | Transportasi peserta FGD | @Rp. 10.000, x 17 orang | Rp. 170.000, |
| Kebutuhan ATK | Kertas 6 rim | @Rp. 30.000, | Rp. 130.000, |
| | Catridge 3 buah | @Rp. 250.000, | Rp. 750.000, |
| | Tape Recorder | @Rp. 250.000 | Rp. 250.000, |
| | Cassete 10 buah | @Rp. 7.500, | Rp. 75.000, |
| | Kamera | @Rp. 325.000, | Rp. 325.000, |
| Honorarium | Fasilitator 3 orang | @Rp. 1.000.000, | Rp. 3.000.000, |
| | Pendamping 2 orang | @Rp. 500.000,- | Rp. 1.000.000, |
| Lain-lain | - | - | Rp. 200.000, |

I. Tim Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan desa binaan ini akan difasilitasi oleh 3 orang dosen Fakultas

Tarbiyah Mataram, yaitu :

Ketua : Nurhilaliati, M.Ag.

Anggota : Dra. Hj. Masturah

Syarifuddin, SS.,S.Ag, M.Pd.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar tahun 1945

UU. No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ahmad Gazali dkk, "Mengelola Madrasah Mandiri Berkualitas", dalam *Transformasi*, Vol. I No. 2 Juli-Desember 2005.

Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia*, (Malang, UMM Press; 2006).

A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung, Mizan; 1998).

Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Logos; 2001).

Transformasi, Vol. 3 No. 2 Edisi Juli-Desember 2007.

Paulo Freire, *Pedagogy of the Opressed*, (New York, Seabury Press, 1070).

LPM IAIN Mataram, *Panduan Kuliah Kerja Partisipatif*, (Mataram, IAIN Mataram; 2007).

Abu Ahmadi dan Nuruhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta, Rineka Cipta; 2001).

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung, Rosdakarya; 2005).

Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara; 2003).

Jasa Ungguh Mulyawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar; 2005).

Roger Kaufman dan English F.W., *Need Assesment: Concept and Aplication*, (Englewood Cliffs, Educational Technology Publication; 1979).

Roger Kaufman dan Susan Thomas, *Evaluation Without Fear*, (New York, New Viewpoint; 1980).

Suharsini Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara; 2001).

Suyata, *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah dan Implikasi Kebijakan*, (Yogyakarta, IKIP; 1998).